

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Membahas mengenai gender, hal yang umum muncul sebagai topik pembahasan adalah mengenai kesetaraan dan ketidaksetaraan. Dua hal ini lambat laun menjadi salah satu permasalahan yang cukup pelik di lingkungan masyarakat. Khususnya di kalangan masyarakat perempuan, yang mana sering dihadapkan pada kondisi demikian di lingkungan terdekat, yakni lingkungan keluarga hingga lingkungan sosial masyarakat bahkan pekerjaan sekalipun. Kesetaraan gender semakin digalakkan oleh banyak pihak khususnya oleh para perempuan baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini didasari oleh keresahan perempuan itu sendiri karena merasa hak asasi mereka yang dibatasi bahkan cenderung seperti tidak dianggap oleh pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan, resah, gelisah, merasa tertindas, hingga marah dan kecewa. Masa kini meski dunia internasional seperti *UN Women*, *The Association for Women's Rights in Development* (AWID), dan *Womankind Worldwide* (Hasanagic, 2024) telah menyerukan aksi untuk adanya kesetaraan gender bagi semua perempuan di dunia namun tak lantas ketidaksetaraan atau bias gender berkurang dan dapat diatasi secara cepat dan menyeluruh. Justru di beberapa wilayah di dunia ini praktek ketidaksetaraan gender masih ada dan

berlangsung dan butuh waktu yang tidaklah singkat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kesetaraan gender di negara Jepang mulai terlihat pada masa Restorasi Meiji di tahun 1868, yang mana baik anak perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan ilmu pendidikan pada taraf pendidikan dasar, kegiatan perdagangan ilegal perempuan mulai dibatasi, dan juga dalam ranah pernikahan pihak perempuan dapat mengajukan perceraian lebih dahulu setelah sebelumnya dilarang (Iwawasa, 1998). Perubahan lebih lanjut terjadi setelah Perang Dunia II dimana perempuan mendapatkan hak untuk memilih di dalam dunia politik serta terbentuknya suatu konstitusi baru di tahun 1946 yang dirancang untuk menjamin kesetaraan gender di Jepang. Setelahnya di tahun 1985 Jepang meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB (Iwawasa, 1998). Hak perempuan untuk menempuh pendidikan ke jenjang selanjutnya berhasil terealisasi pada pendidikan menengah hingga pendidikan tertinggi, dan terdapat program pemberdayaan perempuan untuk menjadi pemimpin dan membuat perubahan sosial dan inovasi yang positif untuk negara Jepang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para perempuan dengan melalui pergerakan membentuk suatu kelompok komunitas atau organisasi tertentu, yang menuntut kesetaraan bagi perempuan. Banyaknya organisasi membuat terbentuknya Federasi Organisasi Wanita Tokyo atau *the Tokyo Federation of Women's Organizations: Tokyo Rengo Funjinkai* di tahun 1923 yang mana memfokuskan hak perempuan

dalam lima bidang yakni *society* (masyarakat), *employment* (pekerjaan), *labour* (tenaga kerja), *education* (pendidikan), dan *government* (pemerintahan) (Molony, 2000).

Pembahasan kali ini berfokus pada *labour* atau tenaga kerja. Peran perempuan dalam dunia kerja di Jepang dapat dibilang hampir tidak ada alias jumlahnya sedikit dan hal ini seperti ini, peran perempuan sebagai pekerja, pula yang justru berlanjut hingga masa kini. Salah satu penyebab rendahnya persentase atau keterlibatan perempuan dalam dunia kerja adalah budaya atau sejarah terdahulu. Kultur atau budaya masyarakat Jepang masih bersifat patriarkis dengan anggapan bahwa perempuan memiliki beban kewajiban utama yakni mengurus anak dan masalah rumah tangga, sementara pekerjaan di luar dikerjakan oleh laki-laki atau seorang suami. Ini juga menjadi alasan bagi banyak perempuan di Jepang yang tak menginginkan dirinya untuk menikah atau hidup melajang seumur hidup namun memilih untuk menggapai cita-citanya sendiri.

Terdapat suatu penelitian di tahun 2018 yang mana menyebutkan bahwa sebanyak hampir 70 persen perempuan di Jepang terdaftar atau tercatat sebagai seorang pekerja, tetapi saat dari mereka, para perempuan, memutuskan untuk menikah dan berkeluarga maka status mereka adalah berhenti bekerja dan kemudian beralih sebagai ibu rumah tangga, sedangkan yang lain sebanyak 30 persen berstatus sebagai pekerja paruh waktu (Waters, 2021). Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak bisa dianggap remeh, selain mengurus rumah dan anak-anaknya juga

mengurus suami tanpa adanya bantuan dari pihak manapun apalagi dari suami atau anaknya. Sederhananya begini, seluruh pekerjaan rumah adalah tugas ibu rumah tangga, baik bersih-bersih rumah memasak, mencuci, belanja kebutuhan rumah, hingga hal sederhana seperti membuang sampah juga bagian daripadanya. Bekerja tidak mengenal waktu dengan waktu istirahat yang terbatas, bila urusan rumah sudah selesai semua seorang ibu rumah tangga baru dapat beristirahat, dan yang spesial adalah hal ini terjadi berulang kali setiap hari berikut hingga tahun-tahun kedepannya.

Besarnya jumlah perempuan yang tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga ini malah memicu suatu masalah baru bagi Jepang karena terjadi penurunan kualitas hidup warganya secara cepat, sehingga permasalahan ini berdampak pada perekonomian negara. Solusi dari permasalahan ini adalah memberikan izin kepada perempuan untuk dapat bekerja yang mana solusi ini sesungguhnya sudah ada sejak sebelum abad ke-20 (Steinberg dan Masato, 2012). Perizinan atas keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dinilai sangat membantu perekonomian Jepang dengan kestabilan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk jangka waktu yang panjang.

Jepang mengeluarkan Peraturan perundang-undangan mengenai Promosi Partisipasi dan Kemajuan Wanita di Tempat Kerja atau *The Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace* dengan tujuan mendorong partisipasi dan kemajuan perempuan dalam angkatan kerja berdasarkan

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Gender Equality Bureau Cabinet, 2022) . Prinsip-prinsip tersebut antara lain yakni:

1. Secara aktif memberi dan memanfaatkan peluang untuk merekrut dan mempromosikan wanita
2. Memperbaiki lingkungan dimana wanita dan pria dapat menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan berkeluarga
3. Menghargai pilihan wanita atas keseimbangan antara hubungan pekerjaan dengan kehidupan berkeluarganya

Berdasarkan peraturan di atas pula, diatur juga permasalahan seputar isu gender dan ketenagakerjaan seperti persentase karyawan perempuan yang baru direkrut, kesenjangan gender selama masa kerja, durasi atau jam kerja, dan persentase perempuan dengan posisi sebagai manajer.

Akan tetapi pilihan untuk bekerja juga tak semulus yang dibayangkan, hampir sepertiga perempuan Jepang pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja (Kompas, 2016). Hampir seluruh perempuan mengaku pernah menjadi bahan olok-olok rekan kerja laki-laki dengan cara mengomentari penampilan, usia, hingga bentuk fisik, serta sering diminta untuk berhenti kerja atau pemecatan sepihak, dan dipaksa berhubungan seksual atau disentuh dengan cara yang tidak sopan. Negara Jepang menduduki posisi ke-121 di tahun 2020, ke-120 di tahun 2021, ke-116 di tahun 2022, dan terakhir berada di posisi ke-125 di tahun 2023 dari total 144 negara dalam indeks

gap gender yang diinisiasi oleh *World Economic Forum* (WEF, 2023). Dengan gelar salah satu negara maju dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki tak membuat Jepang serta merta terhindar dari adanya praktik diskriminasi atau ketidaksetaraan gender pada perempuan.

Shinzō Abe selaku Perdana Menteri Jepang yang memiliki jabatan terlama, di tahun 2012 mengeluarkan kebijakan yang diberi nama *Abenomics*. Kebijakan tersebut dihadirkan dan diterapkan dengan tujuan memperbaiki kondisi negara Jepang yang mengalami deflasi, perekonomian negara mengalami stagnan dalam waktu yang lama dikarenakan populasi masyarakat yang menurun disusul dengan jumlah penduduk usia produktif ikut menurun (Idris, 2022). *Abenomics* secara singkat terbagi menjadi tiga kategori fokus kebijakan inti yakni kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural (CNN Indonesia, 2022). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas dengan memotong birokrasi dan pajak perusahaan, serta memperluas angkatan kerja yang justru menguntungkan bagi sebagian kalangan terutama perempuan. Partisipasi perempuan, manula, dan imigran di tempat kerja dalam rangka memulihkan negara dari kondisi keterpurukan inilah yang justru menjadi salah satu angin segar dalam mengatasi praktik diskriminasi gender.

Womenomics hadir untuk mengurangi adanya praktik ketidaksetaraan gender dalam lingkup dunia kerja dan atau ekonomi dengan cara meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dengan harapan seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi

negara. Fokus pemerintah dalam hal ini adalah pada kelompok masyarakat perempuan dengan kisaran umur 30-34 tahun dan 35-40 tahun, yang mana pada rentan umur tersebut mereka adalah kaum dengan kondisi sulit untuk kembali bekerja karena telah menikah dan mengurus anak serta rumah tangga. Kebijakan seperti ini berhasil menambahkan sebanyak 3,15 juta pekerja di tahun 2020 (Jiyeoun, 2005). Abe mengharapkan lebih banyak perempuan berpartisipasi dalam perusahaan dan memiliki kedudukan strategis seperti jajaran eksekutif. *Womenomics* dipercaya sebagai kekuatan yang mampu mengembalikan perekonomian negara Jepang, dengan perluasan tenaga kerja khususnya perempuan, meningkatkan GDP secara signifikan (diperkirakan sekitar 16%), dan berkontribusi atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jepang (Japaninfo, 2015).

Kebijakan *Womenomics* menjadikan tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja meningkat, namun tidak untuk kondisi sosial masyarakatnya, dalam hal ini yakni hak kesetaraan perempuan. Seorang artis sekaligus seorang pekerja paruh waktu di rumah duka dan penulis *freelance* bernama Yumi Ishikawa mempelopori adanya kampanye masyarakat untuk menolak adanya aturan penggunaan sepatu berhak tinggi atau *high heels* di lingkungan tempat kerja khususnya bagi wanita atau perempuan. Gerakan kampanye ini bernama *#KuToo* yang mana berasal dari dua kata yakni *kutsu* (sepatu “靴”) dan *kutsū* (sakit “苦痛”), dan gerakan ini pula terinspirasi dari gerakan *#MeToo* yang terjadi di Amerika. Ishikawa pada awalnya mengunggah cuitan di Twitter di tahun 2019 mengenai keresahannya yang diwajibkan

menggunakan hak tinggi (sekitar 5 hingga 7 cm) saat bekerja, kemudian cuitannya ini banyak mendapatkan respon masyarakat yang berupa *retweet* dan *like* sebanyak puluhan ribu, serta disusul ribuan cuitan yang menggunakan tagar #KuToo di mana perempuan lain selain Ishikawa mengalami hal serupa (CBS News, 2019). Setelah ramai di Twitter, selanjutnya Ishikawa mulai membuat petisi online yang telah ditandatangani oleh sebanyak 33.904 ribu orang, dengan tujuannya yakni bentuk protes kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang yang memberlakukan kewajiban bagi pegawai atau karyawannya untuk mengenakan sepatu hak tinggi selama bekerja.

Gambar 1.1 Petisi *online* yang dibuat oleh Yumi Ishikawa



Sumber: *change.org*, 2019 (tangkapan layar)

Petisi yang dibuat oleh Yumi Ishikawa dimulai pada tanggal 4 Juli 2019 dengan judul (terjemahan dalam bahasa Inggris) “#KuToo Please give women in Japan the choice to wear flat shoes”, selanjutnya diserahkan Ishikawa kepada Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan telah berhasil

mendapatkan sebanyak 33.904 tanda tangan dari total target 35.000. Melalui petisi ini Ishikawa berharap dapat mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan masyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama yakni dapat menikmati pekerjaan masing-masing tanpa adanya beban. Dengan dibuatnya petisi ini, Yumi Ishikawa bersama dengan masyarakat meminta pemerintah untuk mengeluarkan pemberitahuan kepada perusahaan, selaku tempat pemberi kerja, untuk tidak menjadikan sepatu hak tinggi sebagai kewajiban dalam bekerja. Hal ini dirasa bahwa kewajiban ini merupakan suatu bentuk beban berat yang menjadikan pekerja, khususnya perempuan, kurang efektif dalam bekerja, atau dengan kata lain menggunakan sepatu hak tinggi justru memperlambat dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dengan pembuatan petisi ini, sebagai seorang pekerja, Ishikawa dan yang lain merasa bahwa akan sangat sulit untuk protes atau berbicara langsung kepada atasan sebagai pemberi kerja. Posisi atau kedudukan yang berbeda serta pandangan sosial yang cenderung merendahkan dan tidak adil untuk perempuan, menjadi alasan kenapa petisi tersebut kemudian dibuat dan ditujukan kepada pemerintah dengan harapan pemerintah dapat segera menangani dan mengatasi permasalahan tersebut.

Kampanye *#KuToo* secara lebih rinci tidak hanya membahas mengenai penderitaan atas rasa sakit para karyawati yang diwajibkan mengenakan hak tinggi saat bekerja, namun membahas pula mengenai budaya negara Jepang yang menindas atau diskriminatif terhadap masyarakat khususnya kaum perempuan (Rachelle, 2019). Menurut Ishikawa, aturan perusahaan yang mewajibkan karyawan memakai sepatu

high heels adalah salah satu implementasi dari diskriminasi gender. Penampilan perempuan merupakan hal penting utama dalam dunia pekerjaan, perempuan wajib dan harus berpenampilan sempurna dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Lain dengan laki-laki, penampilan mereka tidak terlalu disoroti karena kemampuan dalam bekerjalah yang menjadi perhatian. Setelah petisi sudah banyak yang menandatangani, Ishikawa kemudian menyampaikannya di dalam suatu forum dan mendapatkan berbagai respon. Ada yang sependapat dikarenakan memakai sepatu hak tinggi secara terus menerus akan mengakibatkan kaki lecet berdarah dan melepuh, atau bahkan gangguan tulang belakang bila parah. Sedangkan pendapat lain mengungkapkan bahwa pemakaian hak tinggi dalam suatu pekerjaan tertentu merupakan suatu keharusan.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana strategi Yumi Ishikawa melalui gerakan kampanye *#KuToo* dalam upaya mengatasi adanya praktik ketidaksetaraan gender di dunia kerja di era Perdana Menteri Shinzō Abe?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bahwa kampanye *#KuToo* menjadi salah satu bukti dari masih adanya keterbatasan hak perempuan dalam mengekspresikan diri dalam ranah publik atau dunia kerja. Ketidaksetaraan gender yang telah melekat masuk dalam kondisi sosial masyarakat di Jepang memang bukanlah suatu masalah yang mudah

untuk diselesaikan karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Untuk itu, penelitian ini mengangkat kampanye *#KuToo* yang menjadi strategi Yumi Ishikawa dalam mengadvokasi pemerintah demi menciptakan kesetaraan gender di Jepang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan kegunaan atau manfaat, baik secara praktis maupun secara teoritis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberi masukan kepada sarana pendidikan atau akademik dalam studi Hubungan Internasional mengenai kasus kekerasan berupa diskriminasi gender terhadap perempuan khususnya dalam isu gerakan *#KuToo* dalam lingkungan kerja, dengan disertai pemahaman bagaimana upaya atau strategi dalam menangani kasus tersebut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi organisasi atau lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, LSM, serta akademisi.

1.5. Kajian Pustaka

Pada sub-bab kajian pustaka ini merupakan langkah yang diambil penulis dengan menganalisa topik atau judul penelitian yang serupa sehingga penulis dapat menentukan hal baru dalam penelitiannya kali ini. Penelitian pertama berjudul *Painful Connections: The "Making" of the #KuToo Online Feminist Movement in Japan / 苦痛なつながり : 日本における#KuToo オンラインフェミニスト運動の「形成」*. Diambil dari jurnal *U.S.-Japan Women's Journal* Vol. 60, dan diteliti oleh Leng Junxiao pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai bentuk perkembangan dari gerakan #KuToo, yang bermula dari cuitan di Twitter hingga mampu mencapai pengaruh online, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa faktor seperti faktor budaya, media, dan politik. Beberapa penyebab atas naiknya popularitas gerakan #KuToo ini disebutkan pada jurnal ini dengan berdasarkan pada etnografi digital, observasi partisipan, dan wawancara mendalam semi struktur. Penyebabnya antara lain yakni penolakan budaya terhadap norma-norma patriarki di tempat kerja berdasarkan pengalaman pribadi mengenai nyeri kaki, pembentukan beberapa komunitas feminis yang terhubung namun juga berfungsi untuk melawan reaksi negatif yang didominasi laki-laki, dan aliansi dengan partai politik oposisi. Pada jurnal penelitian ini, Leng Junxiao mencoba membawa teori *connective action* oleh Lance Bennett dan Alexandra Segerberg serta membawa diskusi Pierre Bourdieu tentang kebiasaan, serta berpendapat bahwa meski #KuToo

telah disebarkan secara persuasif melalui budaya, media dan aliansi politik sebagai suatu kebiasaan kaku di tempat kerja, menunjukkan bahwa aktivis dan pendukung #KuToo mengalami suatu kendala dengan budaya kerja yang eksploitatif, adanya tindakan kekerasan di media sosial, dan kurangnya hubungan dengan partai politik.

Penelitian kedua dengan judul *#KuToo Campaign: An Economic and Gender Analysis* yang diteliti oleh Mishiel Shintabella dan Susy Ong tahun 2023 dalam jurnal Universitas Indonesia yang bernama *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 33 No. 6. Penelitian ini membahas mengenai produktivitas pekerja perempuan yang dipengaruhi oleh penggunaan sepatu hak tinggi serta peranan dari kampanye #KuToo ini sendiri ditengah kondisi sosial masyarakat negara Jepang yang kaku, sehingga penulis menggarisbawahi bahwa perlawanan yang efektif untuk dilakukan oleh masyarakat Jepang yakni dengan cara repetitif tanpa adanya tindak kekerasan yang berarti. Pada jurnal ini peneliti berupaya untuk mengangkat permasalahan kampanye #KuToo sebagai suatu bentuk dari adanya diskriminasi gender dalam lingkungan pekerjaan yang disampaikan dengan menggunakan konsep ekonomi dan gender oleh Swedberg. Selain itu penulis juga berpendapat, dengan mengutip Swedberg (2009), jika diskriminasi terhadap perempuan berhubungan erat dengan devaluasi perempuan dalam masyarakat yang merupakan sesuatu yang terjadi secara universal.

Penelitian ketiga berjudul 日本における性とは何か - #KuToo 運動と服装倒錯の交錯 (Apa itu Seksualitas di Jepang? – Persimpangan antara Gerakan #KuToo dan Transvestisme) yang ditulis oleh Tomoko Sasanuma di tahun 2021, dari jurnal bernama *Ehime-hō gakkai zasshi* Vol. 47. Jurnal penelitian ini berfokus pada apa yang dimaksud dengan gerakan #KuToo dan masyarakat minoritas LGBT terutama pada para *cross-dresser*, membahas bagaimana bentuk diskriminasi terhadap masyarakat minoritas seksual. Dengan mengangkat kebijakan untuk mengatasi isu-isu terkait konvensi sosial mengenai gender. Transvetisme atau *cross-dressing* sendiri merupakan suatu kondisi atau bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku (*cross-dresser*) dengan cara menggunakan perlengkapan atau atribut perempuan yang dilakukan pada saat bercinta dengan pasangannya. Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah seorang *cross-dresser* bukanlah seorang homoseksual atau yang biasa juga disebut dengan banci. Pelaku transvetisme seiring dengan bertambahnya waktu atau usia dapat berubah menjadi transeksualisme bila merasakan kenyamanan hingga memutuskan menjadi perempuan. Permasalahan inti pada penelitian ini adalah isu diskriminasi pekerjaan terhadap kelompok minoritas seksual.

Penelitian keempat berjudul *Twitter, Social Support Messages and the #MeToo Movement* ditulis oleh Alec R. Hosterman, Naomi R. Johnson, Ryan Stouffer, dan Steven Herring di tahun 2018, yang diambil dari jurnal bernama *The*

Journal Of Social Media In Society Vol. 7 No. 2. Dalam jurnal ini penulis menghadirkan teori dukungan sosial (*social support theory*) yang diterapkan untuk mengkategorikan jenis *tweet* atau cuitan yang dikomunikasikan oleh pengguna Twitter. Dan hasilnya menunjukkan bahwa pesan dukungan yang mengandung informasi (*informational support messages*) merupakan konten paling populer yang banyak disorot oleh baik dari kalangan individu maupun organisasi di media sosial, khususnya Twitter dengan fokus penelitian disini yakni gerakan *#MeToo*. Selain itu penulis juga mengusulkan adanya tipe baru dari dukungan sosial bernama dukungan direktif (*directive support*), yang mana pesan berperan sebagai bentuk komunikasi yang diserukan untuk tindakan kolektif dan mengatasi masalah besar terkait kekerasan dan pelecehan seksual. Penelitian mengenai support messages masih terbatas konteks tetapi penulis berpendapat jika pesan direktif (*directive message*) dapat mengatasi kesenjangan penelitian tersebut. Perkembangan *#MeToo* di Twitter dalam memahami korban kekerasan atau pelecehan seksual yang semakin berkembang kian waktu, penulis berpesan untuk memahami peran komunikasi digital secara keseluruhan, karena peneliti juga dituntut untuk dapat memberi arahan atau cara agar para korban dari adanya *sexual assault* dan *sexual violence* untuk bisa sembuh (*healed up*).

Penelitian kelima berjudul *Flowers for Sexual Assault Victims: Collective Empowerment through Empathy in Japan's #MeToo Movement* ditulis oleh Mari Miura. Jurnal ini diterbitkan tahun 2021 oleh *Cambridge University Press* Vol. 17 No.

4. “*Flower Demo*” merupakan suatu gerakan *grassroots* nasional secara *online* yang mengusung konsep *collective empowerment* melalui empati untuk memberikan ruang yang aman untuk para korban pelecehan seksual atau seksisme membagi pengalamannya kepada masyarakat, tidak berfokus pada satu sektor melainkan seluruh sektor masyarakat khususnya di Jepang, dengan harapan mampu meningkatkan kesadaran sosial atas suatu bentuk seksisme yang mengakar dalam sosial masyarakat. *#MeToo Movement* di Jepang menurut penulis berhasil memberikan suara bagi korban kekerasan seksual dalam proses reformasi hukum, namun untuk korban pelecehan seksual sendiri belum memobilisasi gerakan *grassroots*. *Flower Demo* diserukan untuk mencari keadilan dengan membawa bunga sebagai simbol solidaritas terhadap korban kekerasan atau pelecehan seksual. Reformasi hukum dalam hukum pidana dan undang-undang ketenagakerjaan terjadi sebagai dampak dari adanya gerakan nasional *flower demo*, dan bentuk reformasi hukum itu sendiri berbeda-beda karena tergantung pada siapa yang diundang dalam pembahasan resmi. Kesuksesan *#KuToo* yang juga terinspirasi dari *#MeToo* dan dimulai oleh seorang perempuan dan dilakukan secara *online* menurut penulis patut dicatat sebagai pencapaian yang luar biasa, dan diharapkan untuk kedepannya potensi gerakan lokal bertambah dengan menciptakan berbagai bentuk aktivisme baru sesuai dengan kebutuhan para perempuan Jepang untuk berbagi cerita.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya adalah fokus penulis adalah pada *#KuToo Movement* yang merupakan

suatu gerakan sosial masyarakat modern kini menunjukkan bahwa praktik ketidaksetaraan gender masih ada khususnya di Jepang. Penulis mencoba membawa kasus *#KuToo* yang hadir ditengah kebijakan *Womenomics*, suatu kebijakan yang secara singkat dihadirkan oleh pemerintah Jepang guna memperbaiki perekonomian negara yang jatuh akibat menurunnya jumlah populasi penduduk dan pekerja sehingga kemudian mencoba untuk merekrut perempuan agar terjun dalam dunia kerja. Penggunaan sepatu hak tinggi menjadi pemicu adanya gerakan *#KuToo* yang mana sang pencetus terinspirasi dari gerakan *#MeToo* dan pengalaman pribadinya yang menderita akibat dari penggunaan *high heels* atau sepatu hak tinggi. Bagi perempuan menggunakan sepatu hak tinggi di tempat kerja terkadang merupakan suatu bentuk dari aturan dari tempat kerja itu sendiri. Namun sepatu hak tinggi lambat laun dirasa memberikan efek yang tidak baik untuk kesehatan hingga kemudian banyak pakar kesehatan yang tidak menyarankan orang-orang menggunakan hak tinggi dalam waktu yang lama, dan saat ini di banyak negara membebaskan karyawannya untuk tak memakai hak tinggi di tempat kerja kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan untuk penggunaannya. Penulis juga mencoba membawa teori feminisme dalam penelitian ini dengan fokus pada feminisme liberal yang liberal yang memiliki fokus pada kesetaraan gender. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya, berfokus pada perkembangan *#KuToo* sebagai sebagai gerakan yang muncul secara *online* yang dianalisa berdasarkan faktor budaya, media, dan politik dan menggunakan teori *connective action*; ada yang membahas mengenai produktivitas pekerja perempuan yang dipengaruhi oleh penggunaan hak tinggi dan

peran kampanye #KuToo yang dijelaskan menggunakan konsep ekonomi dan gender; penelitian selanjutnya membahas mengenai gerakan kampanye #KuToo dan transvestisme yang merupakan bentuk dari diskriminasi masyarakat minoritas dalam lingkup pekerjaan untuk perempuan dan minoritas seksual atau *cross-dresser*; penelitian keempat berfokus pada peran media sosial yang mempengaruhi kepopuleran konten yang berisi informasi dukungan di Twitter dalam kasus #MeToo sebagai bentuk dari penerapan komunikasi digital yang saling terhubung antara individu sehingga dapat menginspirasi individu maupun organisasi untuk menyerukan penyelesaian atau mengatasi masalah besar dengan memanfaatkan komunikasi sebagai tindakan kolektif demi mendapatkan dukungan direktif, dan gerakan #MeToo menginspirasi adanya kampanye #KuToo; penelitian terakhir berfokus pada konsep collective empowerment yang ada pada empati untuk korban pelecehan seksual dengan cara *flower demo* atau demo bunga, yakni bunga menjadi bentuk solidaritas untuk korban pelecehan dan kekerasan seksual demi mencari keadilan berupa reformasi hukum baik hukum pidana maupun undang-undang ketenagakerjaan, serta penulis mengharapkan adanya bentuk aktivisme baru yang sesuai kebutuhan selain #MeToo dan #KuToo.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

Simone de Beauvoir merupakan tokoh yang mengemukakan gagasannya terkait feminisme di sekitar abad ke-20. Feminisme nyatanya bukanlah sebuah teori murni dalam hubungan internasional seperti realis, liberalis, marxis, konstruktivis,

dan *english school*, melainkan sebuah gagasan yang secara garis besar menggugat dikotomi yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam realitas kehidupan manusia. Dalam kehidupan kedudukan laki-laki sangatlah dominan ketimbang kedudukan perempuan, cara pandang laki-laki seperti ini yang sangat mendominasi kaum perempuan menjadikan perempuan berada dalam posisi subordinat. Pembatasan kedudukan laki-laki dan perempuan sangat kentara dengan perempuan menduduki posisi jauh dibawah laki-laki. Sehingga kemudian fokus feminis adalah perempuan sebagai sorot utamanya dengan membawa misi berupa hakekat kepentingannya yakni emansipatoris dalam kondisi dunia yang cenderung patriarki dengan kendali sepenuhnya berada ditangan seorang pemimpin laki-laki.

Feminis cenderung mengangkat mengenai kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam hal ini kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sejajar, bukan berarti perempuan dan laki-laki bersifat saling kompetitif atau bersaing satu sama lain, bertarung demi mendapatkan suatu hal atau kekuatan tertentu. Keberadaan perempuan dan laki-laki tidaklah memiliki jarak pemisah yang jauh namun sangat berdekatan, dan feminis meyakini bahwa perempuan sesungguhnya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari laki-laki (lebih *powerful*). Meski terdapat pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa kesetaraan gender yang diinginkan feminis adalah dengan tidak memiliki sifat kompetitif, namun terdapat pemikiran kritis seperti demikian, yakni feminis barat. Feminis barat sangat memperjuangkan sifat kompetitif antara perempuan dan laki-laki, sangat dikotomi antara ranah *private*

dan ranah *public*, dan sangat subordinat dengan memiliki penilaian akan perbedaan yang tinggi serta cenderung negatif. Dengan kata lain feminis barat menjunjung prinsip bahwa perempuan terwakilkan dalam ranah publik, terwakilkan dalam kategori kedudukan, keberadaan, kekuatan, dan juga pemikiran atau ide-idenya. Feminis selanjutnya terbagi menjadi 3 kategori atau kelompok yang berbeda yakni feminis liberal, sangat mengutamakan adanya kesetaraan gender; feminis kritis, berpandangan bahwa yang mensubordinasi perempuan adalah *male ego* yang telah terpengaruhi oleh suatu institusi; dan feminis radikal, meruntuhkan dikotomi feminin dan maskulin.

Culture atau budaya menyebabkan adanya kesalahan berpikir yang mana kemudian menciptakan adanya jarak bagi perempuan dan laki-laki dalam ruang pribadi dan publik. Dalam budaya yang berkembang sejak awal telah menempatkan perbedaan posisi bagi masing-masing perempuan dan laki-laki, dengan perempuan berada di ruang pribadi sedangkan laki-laki berada di ruang publik juga dengan posisinya yang menempatkan diri sebagai seorang pelindung bagi perempuan. Dengan penempatan laki-laki sebagai seorang protektor ini menjadikan posisi perempuan semakin dianggap lemah karena tidak dapat melindungi diri, padahal nyatanya tidak demikian. Apabila perempuan diberikan fasilitas yang sama dengan laki-laki, misalnya pembekalan ilmu bela diri, maka perempuan pun juga dapat melindungi dirinya sendiri dan tidak akan bergantung dengan seorang laki-laki. Perempuan memiliki karakter yang spesial yakni *motherly* atau memiliki sifat yang

keibuan. Ini merupakan cara pandang perempuan yang juga salah satu akibat adanya budaya itu sendiri. Meski perempuan dianggap sebagai seorang manusia dengan karakter peduli, pandai merawat, sangat menyayangi, mengasihi, dan lain-lain, perempuan juga dapat berperan sebagai laki-laki yang tegas, tangguh, memiliki aura kepemimpinan, dan lainnya, atau bahkan dapat pula berlaku dua sosok sekaligus namun pada satu gender.

Feminis menggugat dikotomi yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam realitas kehidupan manusia. Fokus feminis adalah perempuan sebagai sorot utamanya dengan membawa misi berupa hakekat kepentingannya yakni emansipatoris dalam kondisi dunia yang cenderung patriarki dengan kendali sepenuhnya berada ditangan seorang pemimpin laki-laki. Feminis liberal memiliki fokus atau tujuan utamanya yakni ada pada kesetaraan gender atau *gender equality is matters*. Kesetaraan gender yang dimaksud feminis liberal yakni baik perempuan maupun laki-laki di dalam suatu hal terutama bidang pekerjaan memiliki posisi yang sama sederajat, tidak mempermasalahkan status gender setiap orang, segala aspek bidang pekerjaan yang banyak ditempati oleh laki-laki juga dapat ditempati oleh perempuan. Perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan cara berpikir dan otak yang sama, namun yang membedakan hanya status gender mereka saja bukan kemampuan apalagi ilmu pengetahuan.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Feminis liberal yang membawa tujuan yakni kesetaraan gender di tengah kondisi masyarakat yang cenderung patriarkis, mengutamakan sosok laki-laki sebagai pemilik kekuasaan untuk mengatur segala urusan baik dalam lingkup keluarga hingga kemasyarakatan. Dikotomi perempuan dan laki-laki oleh feminis liberal berusaha untuk dihilangkan dengan mencoba mengangkat berbagai aktivitas gerakan sosial masyarakat yang mana mengangkat permasalahan gap gender, dalam penelitian ini penulis mengangkat mengenai gerakan kampanye *#KuToo* di Jepang yang menyerukan kesetaraan gender mengenai hak pekerja perempuan dalam penggunaan sepatu hak tinggi dalam dunia kerja. Penggunaan sepatu berhak tinggi di Jepang merupakan suatu budaya yang wajib untuk diterapkan, namun pada nyatanya tidak semua sektor pekerjaan cocok untuk perempuan dalam menggunakan hak tinggi. Dengan minimal hak sebesar 5cm para pekerja diharuskan untuk menggunakannya selama mereka bekerja, yang nyatanya justru penggunaan hak tinggi sangat berpengaruh pada kesehatan. Oleh karenanya, Yumi Ishikawa selaku penggiat kampanye *#KuToo* menginginkan agar kebijakan penggunaan wajib *high heels* di lingkungan pekerjaan dihapuskan dan dibebaskan dalam memilih alas kaki yang sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa mengurangi produktivitas mereka dalam dunia kerja.

Jepang menjadi salah satu negara dengan gap kesetaraan gender terendah menurut *World Economic Forum*. Hal ini diperparah oleh kondisi perekonomian

negara yang dalam beberapa tahun belakangan mengalami penurunan meski negara ini termasuk negara kaya. Perekonomian yang buruk disebabkan oleh rendahnya jumlah pekerja aktif yang tidak dibarengi pertumbuhan penduduk produktif. Maksudnya adalah mayoritas penduduk Jepang adalah lansia dengan rentan usia diatas 65 tahun, lalu munculah kebijakan bernama *Womenomics* dengan harapan dapat membantu pemulihan perekonomian negara. Dengan mencoba merekrut perempuan untuk aktif dalam dunia kerja, *Womenomics* dimulai pada tahun 2013 dengan harapan mampu memulihkan perekonomian negara dan di sisi lain mampu mengurangi adanya gap gender dalam dunia kerja.

Upaya penyetaraan gender dengan merekrut perempuan di dalam dunia kerja di Jepang menurut penulis justru belum berjalan sesuai harapan pemerintah, harus dilakukan upaya perbaikan pada peraturan hak-hak perempuan sebagai pekerja yang mana perempuan berhak mendapatkan hak serupa dengan laki-laki tanpa adanya perbedaan signifikan seperti dari upah hingga jabatan. Dengan begini, tujuan utama dari feminis liberal, *gender equality is matters*, dapat terwujud dengan baik khususnya dalam studi kasus *#KuToo* di Jepang yang merupakan strategi Yumi Ishikawa dalam melawan gap gender.

1.8. Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki argumen bahwa adanya gerakan kampanye *#KuToo* merupakan aksi atau representasi peran dari feminis liberal yang

memiliki fokus pada permasalahan gap gender dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor publik atau dunia kerja khususnya di tengah kebijakan *Womenomics* di era Perdana Menteri Shinzō Abe yang berupaya melibatkan peran perempuan demi memulihkan perekonomian Jepang.

1.9. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode bersifat kualitatif dengan menampilkan bukti berupa dokumentasi berbentuk foto atau berita daring untuk mendukung argumen penulis.

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni dengan memberikan gambaran berupa penjelasan mengenai praktik gerakan *#KuToo* sebagai bentuk daripada ketidaksetaraan gender yang terjadi di Jepang, dengan disertai pula upaya pemerintah setempat dalam menangani kasus tersebut.

1.9.2. Situs Penelitian

Latar atau setting penelitian berada di negara Jepang yang menyoroti kasus atau isu gerakan sosial masyarakat yakni *#KuToo* dengan sumber data penelitian seperti buku, jurnal daring, buku elektronik atau *e-book*, situs resmi, hingga portal berita yang kredibel.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian tertuju pada individu dan atau gerakan kelompok masyarakat yang menggambarkan atau menceritakan suatu hal berkaitan dengan fenomena atau kasus gerakan *#KuToo* di negara Jepang.

1.9.4. Jenis Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan jenis data kualitatif, yang merupakan jenis data yang disajikan dalam bentuk teks, kata-kata tertulis, frasa atau simbol yang menggambarkan orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hubungan kebijakan *Womenomics* dengan kampanye *#KuToo* dan kebijakan konvensional penggunaan sepatu hak tinggi di negara Jepang.

1.9.5. Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data berupa data sekunder, dimana peneliti tidak mendapatkan data dari sumber langsung melainkan dari studi literatur dan artikel berita.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan atau observasi suatu studi literatur yang berupa buku, jurnal daring, situs resmi (seperti CNN, BBC, dan Kompas), dokumentasi.

1.9.7. Kualitas Data

Kualitas data penelitian diperoleh melalui analisis historical situatedness atau sejauh mana penelitian memperhatikan konteks latar belakang historis, sosial, budaya ekonomi, dan politik.

Pada penelitian ini, penulis akan berusaha menjelaskan mengenai peran kampanye *#KuToo* dalam mengatasi adanya praktik gap atau ketidaksetaraan gender khususnya dalam dunia kerja di Jepang, dengan menggunakan perpektif dari feminis liberal yang memiliki fokus pada kesetaraan gender.